ANALISIS HUKUM BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DAN LEMBAGA KEPERCAYAAN

Ratna Syamsiar

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga intermediasi menyalurkan simpanan nasabah dalam bentuk kredit dan berbagai jasa-jasa perbankan wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan rambu-rambu kesehatan supaya bank dalam keadaan sehat. Dengan dilaksanakannya kewajiban oleh bank sebagai lembaga kepercayaan seperti diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, UU No.23 Tahun 1999 Jo. UU No.3 Tahun 2004 dan ketentuan BI, nasabah tidak ragu-ragu menyimpan dana dan menggunakan jasa-jasa perbankan. Dengan demikian akan terwujud misi suatu bank meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Bank, Lembaga Intermediasi*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan menghimpun dana masyarakat merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan tersebut diserahkan oleh Pemerintah kepada beberapa lembaga antara lain bank. Apabila diperhatikan disatu sisi kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat terutama nasabah penyimpan dana. Oleh karena nasabah penyimpan dana mempunyai kepentingan atas keselamatan simpanan dananya pada bank harus dalam keadaan "sehat". Adapun tujuan penyimpanan dana tersebut supaya dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu simpanan dana nasabah wajib dilindungi oleh hukum.

Peranan lembaga perbankan demikian strategis sehingga ada yang berpendapat bahwa tugas bank selain *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak sebagai *agent of trust*, dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa yang diberikan baik kepada perorangan ataupun badan hukum (Thomas Suyatno dkk, 1988:5).

Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya mutlak tergantung dari kepercayaan para nasabah yang mepercayakan dana dan jasa-jasa lain melalui bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan supaya kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun akan menyimpan dananya pada bank terpelihara dengan baik.

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan pembayaran, karena kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak.¹

Berarti beroperasinya bank memerlukan kepentingan setiap perusahaan ataupun perorangan yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam hal ini, arus barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan lancar karena lalu lintas pembayaran dapat berjalan lebih efisien. Meskipun demikian, bagi suatu bank cara dan mutu pemberian pelayanan jasa bank sangat penting. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dan memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada nasabahnya. Dengan demikian, kepentingan semua pihak dapat terjaga dan kehidupan bank akan terus berjalan.

Keberadaan bank semakin penting jika dikaitkan dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan telah menggunakan pembayaran secara giral. Yang dimaksud dengan pembayaran secara giral adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen surat berharga, seperti cek, giro, bilyet yang dapat digunakan dalam kebiasaan dunia perbankan.

¹ Remy Sjahdeini. "Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia". Jakarta 8 April 1997.

Berkaitan dengan hal tersebut unsur yang paling penting memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Hal tersebut tergantung pada kemampuan bank untuk memegang teguh amanat yang diberikan penyimpan dana. Oleh karena satu-satunya lembaga yang diizinkan secara yuridis untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito dan tabungan hanya lembaga perbankan.

Namun sebaliknya berita-berita di media cetak dan elektronik mengenai kesehatan bank akibat kredit bermasalah dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut makin terpicu oleh terjadinya 16 dilikuidasi bank swasta pada tanggal 1 November 1997 yang mengakibatkan banyaknya para deposan yang tidak dapat mengambil dananya dari bank bank tersebut. Akibat peristiwa tersebut para nasabah penyimpan dana secara bersama-sama dan besar-besaran menarik dananya dari bank (terjadi *rush*), sehingga para penyimpan dana banyak yang lebih aman menyimpan dana "di bawah bantal".

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas kewajiban bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan dan akan memunculkan beberapa gagasan yang mungkin menjadi masukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Analisis data secara kualitatif

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (UUP), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Berarti bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis formal merupakan subjek hukum yang mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Untuk itu pelaksanaan bank akan diwakili oleh para pengurusnya.

Definisi bank seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 di atas harus dikaitkan dengan Pasal

3, yaitu tentang tugas utama perbankan di Indonesia. Pada dasarnya tugas pokok bank terdiri dari tiga hal:²

- a. menerima simpanan atau dana dipercayakan oleh masyarakat kepada bank;
- b. Upaya pengerahan dana (*raising funds*) masyarakat;
- c. sebagai perantara (*intermediasi institution*) antara nasabah penyimpan dana dan nasabah dalam perkreditan.

Berarti tugas pokok bank tersebut, memiliki peranan bank sangat penting dalam dunia bisnis karena keberadaan bank diperlukan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Arti penting lembaga perbankan khususnya bank umum yang merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana. Sebaliknya, bank menyalurkan kredit dan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.³

Bank sebagai lembaga intermediasi menyalurkan dana simpanan masyarakat dalam bentuk kredit. Namun bank bukan suatu perusahaan biasa yang berbeda dengan perusahaan dengan lainnya. Suatu bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Oleh karena itu berdirinya suatu bank wajib memperoleh izin usaha untuk beroperasi, bukan hanya milik para pemegang saham bank saja, tetapi telah menjadi milik masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa secara konvensional, fungsi utama dari suatu bank adalah mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Persepsi ini dianut oleh UUP, ketentuan itu dapat dilihat dalam Pasal 3 dan Pasal 1. Secara konvensional pendapatan utama suatu bank berasal dari operasi perkreditannya. Namun pelaksanaan perkreditan itu akan berhasil, jika dilakukan oleh suatu bank dengan dana yang cukup. Sebagian besar dana tersebut berasal dari

² Simorangkir, O.P. 1976. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Cet. 1 Jakarta: STIE Perbanas. hlm. 3.

³ Suyatno, Thomas.dkk. 1988. *Kelembagaan Perbankan*. Cet.1. STIE Perbanas Gramedia. Jakarta. hlm.xi.

dana masyarakat. Menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/12/Kep/GBI dimungkinkan bagi suatu bank memiliki modal hanya 4% dari assetnya. Berarti dana bank untuk melaksanakan perkreditannya sebagian besar (96% dari assetnya) berasal dari dana simpanan masyarakat. Namun ketentuan saat ini menyatakan bahwa suatu bank wajib memiliki modal 8% dari assetnya.

Salah satu dari sekian banyak usaha bank adalah memberi kredit. Pemberian kredit dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena setiap pemberian kredit oleh lembaga perbankan akan mengandung risiko kegagalan atau kemacetan. Berarti pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas seperti dimaksud dalam UUP. Selain itu diperlukan pengawasan untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian. Bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam praktik yang berlangsung selama ini lebih menekankan perhatiannya pada pelaksanaan pengawasan tidak langsung dalam bentuk audit. Berarti BI cenderung memusatkan perhatiannya pada pemantauan pemenuhan asas pemberian kredit oleh tiap-tiap bank.⁴

Apabila diperhatikan uraian di atas, besar sekali kepentingan masyarakat penyimpan dana terhadap terjaminnya eksistensi suatu bank. Bubarnya suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan pemegang saham bank saja, tetapi kepentingan sistem keuangan dan pembayaran suatu negara serta kepentingan penyimpan dana. Kepentingan penyimpan dana lebih besar dari pada kepentingan para pemegang saham bank. Hal tersebut berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank yang bersangkutan. Kesediaan tersebut akan diperoleh bank apabila masyarakat mempunyai kepercayaan kepada suatu bank.

Apabila suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari suatu negara yang bersangkutan bank tersebut telah menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya suatu bank bukan hanya harus dijaga oleh pemilik bank saja, tetapi masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi penting jika diingat bahwa *domino effect*, yaitu

menular kepada bank-bank yang lain. Ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau gilirannya akan mengganggu fungsi sistem keuangan dan fungsi pembayaran dari negara yang bersangkutan. Sebagai contoh pernah terjadi pada tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9000 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada ambruk secara berantai ketika terjadi *Great Depression* (Remy Sjahdeini, 1997b:1). Oleh karena itu, diperlukan informasi untuk nasabah penyimpan dana mengenai tingkat risiko kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan dan penempatan dana. Apabila informasi telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan oleh bank sebagai perantara penempatan dana atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.

Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat terjadi, jika kegiatan usahanya selalu dalam keadaan sehat. Dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan bank, BI diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas pada bank. Pemeriksaan dilakukan BI baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 31 UUP.

Kenyataannya para nasabah penyimpan dana ataupun nasabah debitur tidak mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang mereka percayai. Para nasabah yang bersangkutan akan mengetahui setelah terjadi kegoncangan pada bank tersebut. Berarti nasabah penyimpan dana tidak mempunyai kesempatan untuk mengamankan atau menarik dananya.

Laporan bank dunia menunjukkan bahwa kelemahan sistem perbankan, bahkan jauh sebelum krisis terjadi merupakan munculnya bank sakit akibat terlalu dibebani ekspansi kredit yang pesat, terus mengucurkan kredit untuk kelompoknya sendiri. Standar kelayakan pemberian kredit dilanggar tanpa terkena sanksi. Banyak bank yang modalnya tidak mencukupi, beberapa diantaranya sudah *insolvensi* sebelum masa krisis. Saat rupiah mulai melemah, portofolio

⁴ InfoBank No. 174/1994. hlm 18.

bank sakit tidak mampu menghadapi keadaan yang memburuk.⁵

Dalam keadaan demikian, Keputusan Pemerintah yang telah melikuidasi 16 bank menunjukkan adanya perubahan sikap Pemerintah tentang doktrin *too big fail*. Doktrin tersebut memandang bank sebagai institusi keuangan tidak boleh bangkrut. Karena eksistensi bank menyangkut berkaitan dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap keuangan nasional. Pemerintah mempunyai kewajiban membantu dengan segala cara dan biaya untuk menyelamatkan bank yang sedang menghadapi kesulitan.⁶ Berarti doktrin *too big to fail* telah menjadi dasar bagi pelebagaan penyelamatan bank atau dalam kalangan perbankan internasional dikenal dengan konsep "jaring penyelamat" (*safety net*). Hal tersebut sebagai jaminan Pemerintah membantu mengurangi kerugian nasabah penyimpan dana bila suatu bank bangkrut. Akhirnya terwujud kesediaan bank sentral untuk memberikan kredit likuiditas atau mengambil alih sebagian saham dan manajemen suatu bank. Menurut ketentuan Ps 37b UUP kewajiban setiap bank menjamin dana masyarakat. Selanjutnya dibentuk UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap bank menjamin dana masyarakat yg disimpan pada bank yang bersangkutan. Dengan demikian, jaring penyelamat akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap perbankan karena nasabah dan kreditur bank dapat merasa tenang. Dengan adanya jaminan Pemerintah tidak terburu-buru menarik depositnya dari bank. Walaupun terdapat pembatasan jaminan bank terhadap nasabah penyimpan dana.

UUP menentukan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian supaya bank selalu dalam keadaan sehat sehingga *likuid* dan *solvent*. Dengan demikian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi.

Walaupun prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu kesehatan bank telah ditentukan agar dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia, masih

terdapat bank tidak dikelola dengan sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu kesehatan bank. Selanjutnya ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pemegang saham dan pengurus bank. Sehubungan dengan hal itu, SK Direksi Bank Indonesia No. 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 Pasal 2 dijelaskan ihwal kriteria perbuatan tercela. Berarti bagi mereka melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Selain itu beroperasinya suatu bank ditentukan faktor modal, ini merupakan hal yang sangat vital. Modal bank dapat terdiri dari modal sendiri dan modal pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak-pihak yang memperoleh manfaat dana simpanan nasabah. Apabila pihak ketiga menanamkan modal dalam jumlah besar, pihak bank dapat beroperasi dengan baik. Penanaman modal oleh para investor sangat membantu kelancaran operasional bank. Makin besar modal disetor oleh para investor, makin sedikit kesulitan yang dialami oleh pihak bank dalam memenuhi tagihan krediturnya. Dengan penggunaan modal pihak ketiga, diharapkan jalannya perusahaan dapat terlaksana dan memperoleh keuntungan.

Sebagai lembaga keuangan, suatu bank menjual kepercayaan dan jasa tersebut (Simorangkit, 1976:39). Selanjutnya dengan menggunakan modal pihak ketiga, terdapat kesempatan leluasa bagi bank memberikan kredit dengan harapan memperoleh keuntungan dari bunga (*trading on equity*). *Trading on equity* mengandung risiko besar karena makin kecil modal sendiri, makin kecil pula *margin of safety*, margin merupakan tulang punggung dari risiko kerugian.⁷

Kewajiban bank mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan sesuai ketentuan UUP yang telah ditetapkan BI. Hal ini diperlukan masyarakat mengingat tingkat kesehatan masing-masing bank. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak mengerti untuk membaca neraca suatu bank.

Neraca yang diumumkan bank hanya terbatas pada keadaan keuangan, sedangkan kesehatan suatu bank tidak hanya dinilai

⁵ Kompas 22 Juli 1998, hlm 1, kol. 2-5.

⁶ Gatra, 15 November 1997.

⁷ Simorangkir. 1983. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Komersial Perbankan*. Yagrat. Jakarta, hlm. 18.

berdasarkan keadaan keuangan saja, masih terdapat faktor-faktor lain. Menurut ketentuan BI, penilaian terhadap manajemen bank meliputi 100 (seratus) faktor. Aspek manajemen tersebut tidak terungkap di dalam neraca yang diumumkan bank.⁸

Apabila bank tidak menginformasikan tingkat kesehatan dan keadaan keuangan yang sesungguhnya akan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan kemungkinan terjadi likuidasi. Hal ini terjadi ketika Pemerintah Indonesia mengambil tindakan pencabutan izin usaha terhadap 16 (enam belas) bank pada tanggal 1 November 1997.⁹

Uraian tersebut di atas menjelaskan fungsi modal adalah sebagai faktor untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Fungsi esensial modal bank untuk menjaga agar bank tetap beroperasi. Sehingga penghasilan bank dapat menutup kerugian. Hal ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan unsur penting untuk menentukan berhasilnya usaha suatu bank. Dengan demikian kepentingan suatu bank memerlukan kepercayaan terhadap masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat kepada bank hilang akan mengakibatkan masyarakat tidak akan menyimpan dana pada bank tersebut. Mengingat bank sebagai lembaga kepercayaan, eksistensi suatu bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat kepada bank, makin banyak masyarakat menyimpan dana dan menggunakan jasa bank tersebut.

UUP tidak menentukan secara jelas mengenai hubungan kepercayaan, hanya dalam Pasal 1 butir 5 dinyatakan, "simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana...". Penjelasan Pasal 29 bahwa "...bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan...". Berarti hubungan antara nasabah penyimpan dana dan pihak bank dilandasi kepercayaan. Sebaliknya, bank mempunyai kewajiban membayarkan

kembali simpanan nasabah tersebut pada saat diperlukan. UUP mengakui hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa dalam dunia perbankan hubungan antara bank dan nasabah dilandasi asas kepercayaan. Masyarakat mempercayai bahwa bank sebagai suatu lembaga yang cukup aman untuk menyimpan dana. Kedudukan antara bank dan nasabah penyimpan dana mempunyai posisi yang sama, walaupun praktik menunjukkan kedudukan bank lebih kuat dibandingkan dengan nasabah penyimpan dana.

Kenyataannya nasabah selalu percaya kepada hal-hal yang berkaitan dengan nasihat pejabat bank sebagai terpercaya kebenarannya dan dapat diandalkan. Bukan hanya sebatas meminta informasi dan nasihat kepada bank mengenai urusan keuangannya serta bisnisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami kewajiban bank, walaupun tanpa diminta, harus memberikan informasi dan advis atas transaksi yang dilakukan melalui bank, kemungkinan terjadi peluang risiko kerugian yang tinggi bagi bank.¹⁰

Uraian tersebut merupakan kewajiban bank untuk menyediakan informasi dan advis sebagai realisasi *fiduciary obligation*. Nasabah mempunyai hak untuk memperoleh informasi berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) UUP. Apabila nasabah mengalami kerugian dapat menggugat bank berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Bank wajib menjalankan usahanya dengan menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabahnya. Hal tersebut telah ditentukan Pasal 29 Ayat (3) UUP.

Dengan demikian, bank memerlukan kepentingan terhadap kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada bank dan memanfaatkan jasa bank, apabila terdapat jaminan bank mengenai keterangan keuangan nasabah penyimpan dana. Kepercayaan masyarakat terhadap bank timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi kerahasiaan dan keamanan dana nasabah.

⁸ Remy Sjahdeini. 1998. *Likuidasi dan Tanggungjawab Pengurus Pemegang Saham terhadap Pihak Ketiga*. Jakarta. hlm. 9.

⁹ Remy Sjahdeini, 1998. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Cet. 1. Institut Bankir Indonesia. Jakarta., hlm. 3

¹⁰ Remy Sjahdeini, 1993, *Ibid*, hlm. 49.

Pada akhirnya peranan lembaga perbankan yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan menunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian guna mencapai tingkat penyempurnaan sistem perbankan nasional. Lembaga perbankan diharapkan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, melindungi dana nasabah, serta menyalurkan ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Bank wajib memberikan informasi dan advis sebagai realisasi *fiduciary obligation* kepada nasabah penyimpan dana dan pengguna jasa bank.

Makin tinggi kepercayaan masyarakat kepada bank semakin banyak masyarakat menyimpan dana dan menggunakan jasa-jasa bank.

Saran

Untuk menjaga citra perbankan sebagai tempat menyimpan dana yang aman, perlu diwujudkan secara profesional sebagai lembaga kepercayaan.

Bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan rambu-rambu kesehatan bank supaya dikenakan sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

InfoBank No. 174/1994

Harian Umum *Kompas* 22 Juli 1998.

Simorangkir, O.P. 1976. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Cet. 1 Jakarta: STIE Perbanas.

———. 1983. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Komersial Perbankan*. Yagrat. Jakarta.

Subekti, R. 1976. *Hukum Perjanjian*. Cet.4 Intermasa. Jakarta.

———. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung.

Suyatno, Thomas.dkk. 1988. *Kelembagaan Perbankan*. Cet.1. STIE Perbanas Gramedia. Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Cet. 1. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.

———. "Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia". Jakarta 8 April 1997a.

———. "Rahasia Bank Suatu Dilema". Jakarta 15 September 1997b.

———. "Likuidasi dan Tanggungjawab Pengurus Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga". Jakarta 30 Maret 1998a.

———. "Keadaan Perbankan Indonesia dan Upaya-Upaya Penyehatannya". Jakarta 8 Juni 1998b.

Winarno Zain. "Bank Indonesia". Gatra 15 November 1997.